



Aksi Pencegahan Korupsi – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

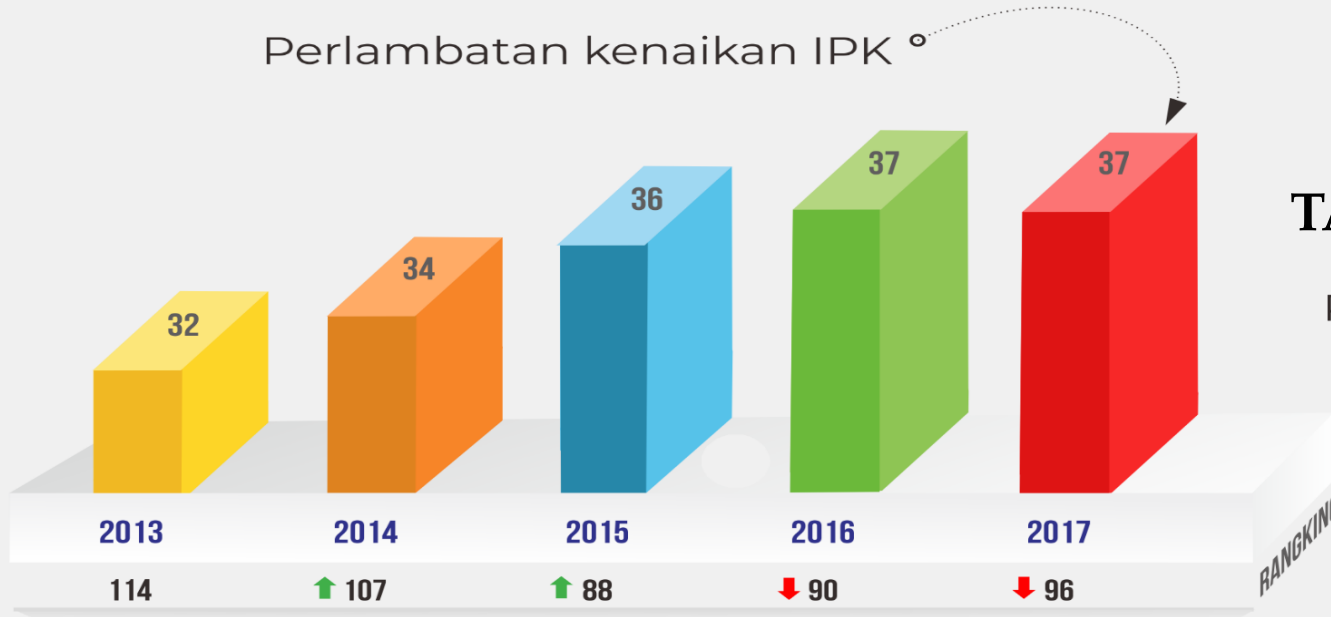
Panduan bagi Pemerintah Daerah



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



INDEKS PERSEPSI KORUPSI



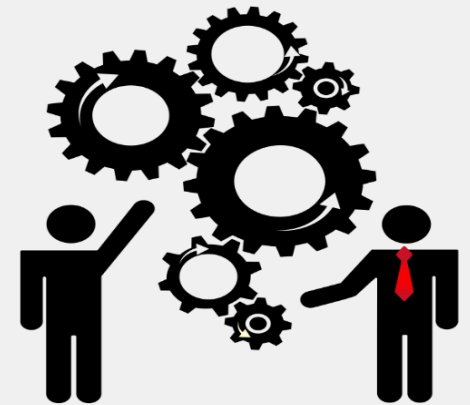
38

TAHUN 2018

Penurunan peringkat

Pencegahan korupsi adalah prioritas

**SINERGI DAN KOLABORASI
K / L / D**



STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



TIM NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (TIMNAS PK)



Kementerian
Dalam Negeri



Kementerian
PAN & RB



Kementerian PPN/
Bappenas



KANTOR STAF PRESIDEN

TUGAS:

- Koordinasi, sinkronisasi & Monev Stranas PK
- Laporan
- Mempublikasikan pada masyarakat

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)

Tanggal 19 Oktober 2018

Lampiran : Aksi-aksi Pencegahan Korupsi

Sekretariat Nasional PK (SETNAS PK)

- TA Cegah Korupsi
- TA Monev



KEPUTUSAN BERSAMA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN

NOMOR 1 TAHUN 2018
NOMOR 01 SKB/M.PPN/10/2018
NOMOR 119/8774/SLJ
NOMOR 15 TAHUN 2018
NOMOR NK-03/KSK/10/2018

TENTANG

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2019-2020

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018



3 Fokus STRANAS PK



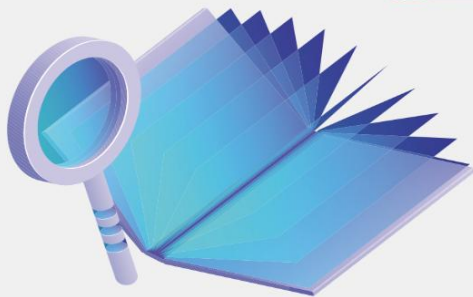
PERIJINAN & TATA NIAGA



KEUANGAN NEGARA



PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI



Latar Belakang

Bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha

Korupsi Perizinan menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi, serta lapangan kerja

Korupsi Tata Niaga menaikkan biaya ekonomi pada komoditas pokok sehingga menjadi beban bagi golongan ekonomi lemah

Korupsi pada penerimaan negara berdampak tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran

Korupsi pada sisi belanja (terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah) berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional

Korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI



3 FOKUS

11 AKSI

1 PERIJINAN & TATA NIAGA

2 KEUANGAN NEGARA

3 PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI BIROKRASI

 Aksi di K/L sebagai PJ

 Aksi di Daerah sebagai PJ

1

2

3

4

5

6

7


8


9


10


11


Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal 



Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan  

Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi 

Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis 


Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta 

Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik 

Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa  

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak 

Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  

Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa 

Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana 

Aksi PK

Stranas PK – Korsupgah

Stranas PK	Korsupgah
Tim Nasional terdiri dari 5 lembaga mewakili Pemerintah: KPK, Kemendagri, Bappenas, Pan/RB, dan KSP. KPK sebagai koordinator.	Dikoordinasikan oleh KPK
Aksi PK untuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab	Aksi PK untuk Pemerintah Daerah
Pelaporan dilakukan per triwulan	Pelaporan dilakukan sepanjang tahun
Pelaporan dilakukan via: https://jaga.id/monitoring	Pelaporan dilakukan via : https://korsupgah.kpk.go.id

Catatan

- Aksi PK Stranas PK bisa saja beririsan dengan Aksi PK Korsupgah KPK. Hal ini menunjukkan bahwa Stranas PK dan Korsupgah KPK melihat adanya permasalahan pencegahan korupsi yang sama hingga dapat mempercepat pelaksanaan Aksi PK tersebut
- Pelaporan Aksi PK oleh Pemda dilakukan 2 (dua) kali kepada :
 1. Stranas PK sebagai kewajiban kepada Pemerintah yang bertanggung jawab atas keberlangsungan negara bebas korupsi
 2. Korsupgah KPK sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi

Posisi Pemda

- Dalam melaksanakan Aksi PK, **Pemda** memiliki posisi sebagai **Penanggung Jawab** dan **Instansi Terkait**.
- Aksi PK dimana Pemda sebagai Penanggung Jawab, maka Pemda harus melaporkan capaian Aksi PK tersebut secara langsung kepada Setnas PK setiap triwulan
- Aksi PK dimana Pemda sebagai **Instansi terkait**, pelaporan capaian Aksi PK Pemda disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi Penanggung Jawab Aksi PK tersebut setiap triwulan (koordinasi akan dilakukan oleh KL bersangkutan)

Aksi PK Pemda sebagai Penanggung Jawab

Fokus 1 (Perizinan dan Tata Niaga)

Aksi 2: Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan

Kriteria Keberhasilan:

1. Optimalisasi Tata Kelola Pengawasan Hutan
2. Dibukanya data penetapan hutan yang sudah ditetapkan ke publik

Ukuran Keberhasilan:
Implementasi Kebijakan Satu Peta
(*One Map Policy*)

Fokus 2 (Keuangan Negara)

Aksi 7 : Peningkatan Profesionilitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kriteria Keberhasilan:

1. Tercapainya tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa minimal pada level 3 di Pemerintah Daerah
2. Terimplementasinya e-katalog lokal
3. Meningkatnya efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan di tingkat Pemerintah Provinsi

Ukuran Keberhasilan:

1. Terbentuknya UKPBJ struktural di Pemda
2. Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Pemda
3. Dialihkannya seluruh anggota Pokja pengadaan barang dan jasa di Pemda menjadi pejabat fungsional pengadaan UKPBJ
4. Digunakannya e-katalog lokal di seluruh Pemerintah Provinsi
5. Terlaksananya konsolidasi pengadaan di 5 Pemerintah Provinsi.
 - a. Provinsi DKI Jakarta
 - b. Provinsi Jawa Barat
 - c. Provinsi Jawa Tengah
 - d. Provinsi Jawa Timur
 - e. Provinsi Sumatera Utara

Sub Aksi PK Pemda sebagai Penanggung Jawab (1)

Implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*)

- a. Pemprov Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu
- b. Pemprov Kalimantan Tengah + Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Katingan, Lamandau, Murung Raya, Pulau Pisau, Sukamara, dan Seruyan serta Kota Palangkaraya
- c. Pemprov Sulawesi Barat + Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasang Kayu
- d. Pemprov Riau + Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Meranti, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak, serta Kota Pekanbaru dan Dumai
- e. Pemprov Papua + Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Nabir, Kepulauan Yapen, Mimika, Paniai, Puncak Jaya, Asmat, Boven Digoel, Keerom, Sarmi, Mappi, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Supiori, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai

UKPBJ

- Seluruh Pemda (Pemprov, Pemkab, dan Pemkot)

Sub Aksi PK Pemda sebagai Penanggung Jawab (2)

E-Katalog

- 34 Pemprov

Konsolidasi-Sentralisasi Pengadaan

- 5 Pemprov : Pemprov DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara

Pelaporan

- <https://jaga.id/monitoring>
- Login menggunakan *username* dan *password* yang sama dengan login ke aplikasi MCP Korsupgah

Periode	Batas akhir pelaporan
B03 dan B15	12 April tahun berjalan
B06 dan B18	5 Juli tahun berjalan
B09 dan B21	5 Oktober tahun berjalan
B12 dan B24	15 Januari tahun berjalan

- a. Pelaporan capaian target triwulan dilakukan oleh Inspektorat berkoordinasi dengan Unit Kerja pelaksana Aksi PK
- b. Tentukan persentase (%) capaian , masukkan catatan, dan unggah data dukung yang diperlukan. Panduan % capaian dan data dukung sudah tersedia dalam aplikasi

Capaian B03 Stranas PK

Provinsi Jawa Timur

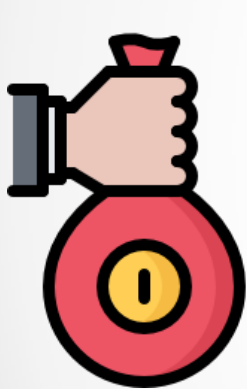
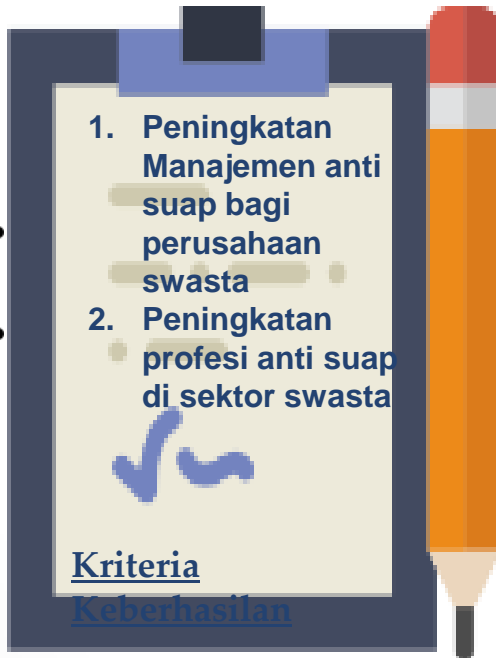
No	Target	Data Dukung	Capaian
Pemerintah Provinsi Jawa Timur			
1	Tersedianya hasil analisis belanja (spend analysis) terhadap dokumen keuangan		100%
2	Analisa supply side untuk mengetahui kebutuhan sektor terhadap ketersediaan pasar tahun 2019		100%
3	Telah ditandatanganinya MoU dan perjanjian kerja sama antara LKPP dan Pemprov Kalimantan Barat dan Jawa Timur		100%
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota			
4	Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ struktural	Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandangani	0-49%: 3
			50%: 4
			100%: 32

Capaian B03 Stranas PK

Provinsi Bali

No	Target	Data Dukung	Capaian
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota			
1	Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ struktural	Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang UKPBJ yang sudah ditandatangani	0-49%: 3
			50%: 2
			100%: 5

Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

1. Peningkatan Manajemen anti suap bagi perusahaan swasta
2. Peningkatan profesi anti suap di sektor swasta

Kriteria Keberhasilan



Penerapan sistem manajemen anti suap (standar yang mirip dengan ISO 37001, Panduan CEK – Pencegahan Korupsi Profit Dikyanmas KPK, maupun panduan anti suap sektor swasta) secara meluas melalui OJK, Kementerian BUMN, SKK Migas, Kementerian Dalam Negeri



1. Kementerian BUMN – BUMN
2. Kementerian Dalam Negeri - BUMD
3. Otoritas Jasa Keuangan – Industri Jasa Keuangan
4. SKK Migas – K3S

FOKUS BUMN – IJK - BUMD

BUMN
Hadir untuk negeri



Provinsi Piloting

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Bali
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah
7. Jawa Timur
8. Banten
9. Sulawesi Utara
10. NTT

BPD/PDAM

**Pelaporan BUMD Provinsi kepada
Kemendagri sebagai K/L
Penanggung Jawab Aksi**



Kesehat
an



Infrastruktur



Migas



Pangan



Kehutanan



Perbanka
an



High Risk

Terima Kasih



**SETNAS PENCEGAHAN KORUPSI
Gedung Merah Putih KPK**

Jl. Kuningan Persada No.4 Jakarta,
Indonesia - 12950

021-25578300 ext. 8104 | Email:
stranaspk@kpk.go.id

<https://stranaspk.kpk.go.id> |

<https://jaga.id/monitoring>

